

Wacana Khutbah Jelang Pilkada

Faisal Zaini Dahlan

Dosen UIN Imam Bonjol Padang

TEKAD Bawaslu menciptakan suasana kondusif selama tahun politik 2018-2019 patut diapresiasi. Kondisi aman dan damai adalah kebutuhan riil masyarakat, lebih-lebih tingkat akar rumput. Sementara perhelatan politik sendiri meski dimaksudkan sebagai sarana yang demokratis untuk mensejahterakan rakyat, namun seringkali terkesan lebih merupakan kepentingan elit. Karena itu, dukungan penuh harus diberikan kepada setiap upaya yang berpihak kepada masyarakat luas termasuk membangun suasana aman damai.

Awal tahun ini, sejumlah media menulis rencana Bawaslu menggelar semacam jambore nasional untuk mengumpulkan aktor-aktor lintas iman, aktivis, pemuda, serta tokoh-tokoh agama. Mereka akan difungsikan sebagai juru bicara membantu Bawaslu mencegah isu-isu SARA yang dinilai bisa mencederai Pilkada. Sebelum rencana itu terlaksana, belakangan muncul lagi wacana baru Bawaslu yang ditanggapi beragam. "Wasit" kompetisi pesta demokrasi itu disebut-sebut tengah menyusun materi khutbah yang kontributif menciptakan suasana kondusif di musim Pilkada.

Pro Kontra

Respons beragam muncul menanggapi wacana Bawaslu tersebut. Sebagian menilai lembaga itu memasuki wilayah yang bukan domainnya. Bawaslu lalu mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak akan mengawasi khutbah dan tidak mewajibkan materi itu untuk dikhutbahkan. Menurut anggota Bawaslu Afifuddin seperti dirilis detikcom (09/2/2018), ini adalah bagian dari sosialisasi semangat pencegahan pelanggaran pemilu. Menurutnya materi itu akan menjadi referensi bagi tokoh agama dalam pencegahan pelanggaran, sekaligus mendinginkan suasana kampanye agar ujaran kebencian SARA tidak

merebak. Penyusunan khutbah itu sendiri juga melibatkan tokoh-tokoh agama.

Tribunnews.com (13/2/2018) memberitakan, meski Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amin tidak berkeberatan, tetapi hendaknya lembaga itu berkonsultasi dengan pihaknya. Sementara Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis seperti dirilis *Republika*, Sabtu (10/2) menegaskan, siapapun tidak bisa mengatur materi khutbah dan ceramah. Apalagi pemerintah tidak memiliki prosedur mengangkat khatib sehingga mustahil untuk mengatur materi khutbah dan ceramah.

Sedangkan Maneger Nasution dari Muhammadiyah, menyebut ide itu menggelikan. Menurutnya, mandat yang diemban Bawaslu adalah mengawasi hajatan politik, karenanya "kebesaran baju" jika lembaga itu mengurus kurikulum khutbah (Kiblat.net, 11/02/18). Ia minta Bawaslu menjelaskan ke publik agar tidak berkembang gungjing bahwa lembaga ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Menurutnya Bawaslu justru harus fokus menunaikan mandat sebagai wasit profesional yang memastikan terselenggaranya semua tahapan secara independen.

SARA dan Politik Uang

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam "Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas" (*Republika.co.id* 10/02/18), menyebut isu SARA dan politik uang di Pilkada sebagai racun

demokrasi. Ketegasan menolak politik uang dan politisasi SARA ini merupakan dua dari empat arahan Presiden. Dua lainnya adalah peningkatan partisipasi politik serta mencari pemimpin yang mampu memegang amanah dan bekerja untuk rakyatnya. Karena itu, sangat tepat jika Ketua Bawaslu Abham, menegaskan khutbah yang disusun berisi ajakan melawan politik uang dan politisasi SARA (*Tempo.co* 9/02/18).

Berkaca pada Pilkada serentak 2017, politik uang masih fenomenal. Muhammad, Ketua Bawaslu saat itu menyebut 90 persen dari 101 daerah yang menggelar pilkada rawan politik uang (*Tempo.co*, 13/02/17). Pihaknya menemukan sekitar 600 kasus dugaan politik uang yang terjadi hampir di semua daerah. Kejahatan politik yang massif di masa tenang ini dilakukan oleh timses, relawan, maupun perorangan, baik dengan membagikan uang maupun barang.

Meski demikian, Eep Saifullah Fatah dalam *Tempo.co* (14/01/18), memprediksi politik uang akan semakin tidak laku dan tidak efektif dalam Pilkada 2018. Jika lima tahun lalu angkanya mencapai 17-22 persen maka menurutnya berkaca pada Pilgub DKI Jakarta 2017, angka itu menurun menjadi 7,4 persen. Sedangkan untuk wilayah lain rata-rata juga di bawah 10 persen. Menurutnya, penurunan ini selain semakin cerdasnya para pemilih, juga karena pelaku yang memberi uang juga bukan

satu calon saja.

Sedang potensi politisasi SARA, masih banyak pihak yang mengkhawatirkannya. Pengalaman Pilgub DKI Jakarta yang dinilai sebagian pihak bernuansa SARA, dicurigai akan menular ke daerah. Meski begitu, Djayadi Hanan, Direktur Utama Saiful Mujani Research Consulting, meyakini potensi isu SARA pada Pilkada 2018 akan minim. Karena menurutnya politik identitas akan menguat jika terpenuhi dua faktor. *Pertama*, tingkat kompetitif yang tinggi disebabkan tidak adanya pihak dominan. Dalam duel *apple to apple*, politik identitas akan menjadi dasar penentu, demikian pula jika ada pihak merasa identitasnya sedang dipertaruhkan. *Kedua*, tajamnya polarisasi pasangan calon maupun polarisasi dukungan yang berhadapan-hadapan, baik berdasar suku ataupun agama.

Menurut Hanan, meski dalam Pilkada serentak 2018 kompetisi cukup ketat karena minimnya pasangan yang dominan, namun dari aspek polarisasi tidak memenuhi syarat untuk menguatnya politik identitas. Ia berargument karena di samping dukungan partai politik lebih cair, juga umumnya calon kepala daerah berasal dari agama dan suku mayoritas di daerahnya. Karena itu jikapun disebut ada ancaman, namun tidak terlalu tinggi. Data ini menurutnya sesuatu yang menggembirakan.

Dengan demikian, meski disepakati bahwa politik uang dan politisasi SARA menjadi ancaman demokrasi, namun kiranya tidak perlu terlalu dibesar-besarkan apalagi sampai menerabas tapal batas wilayah sakralitas agama. Bila tidak hati-hati, wacana itu malah bisa membangun kesan bahwa mimbar khutbah berpotensi besar mencederai demokrasi. Jika ini terjadi, polarisasi yang jauh lebih tajam justru akan bisa terbangun. Semoga tidak, *wallahu a'lam. (*)*